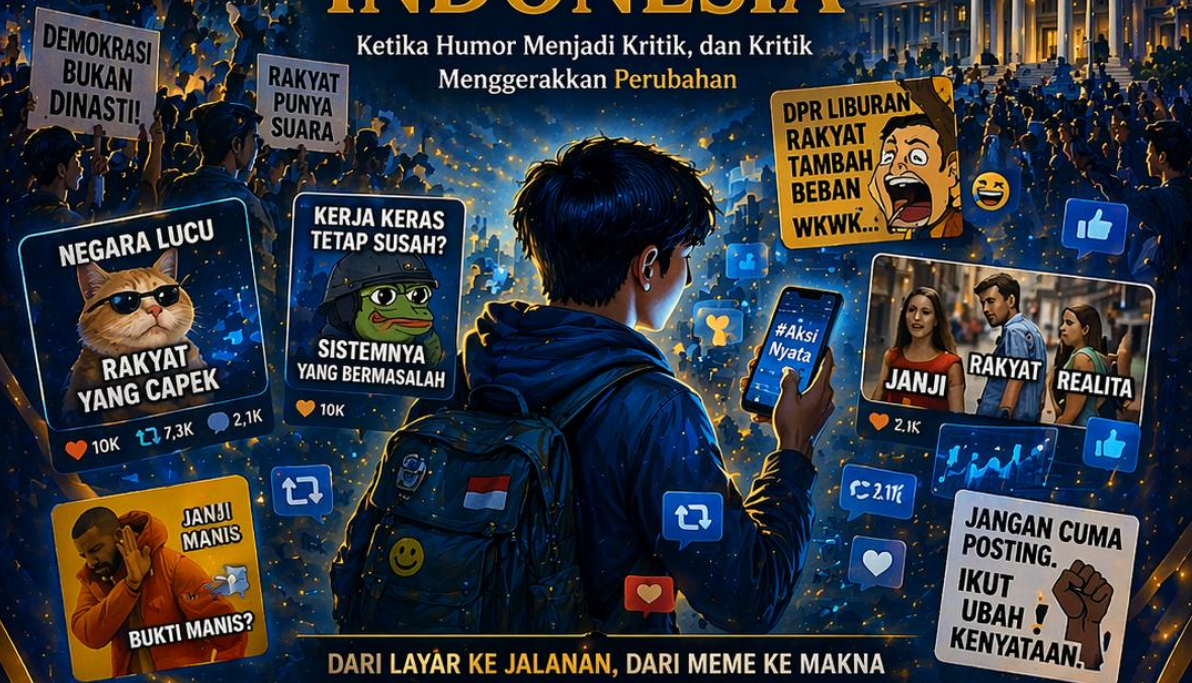


“
Tertawa boleh.
Diam? Jangan!
#SuaraKitaMasaDepan

ANAK MUDA, MEME POLITIK, — DAN — BAHASA BARU DEMOKRASI INDONESIA

Ketika Humor Menjadi Kritik, dan Kritik
Menggerakkan Perubahan



DARI LAYAR KE JALANAN, DARI MEME KE MAKNA



BUDAYA MEME
SEBAGAI EKSPRESI
POLITIK



GENERASI MUDA
SEBAGAI KEKUATAN
DEMOKRASI



MEDIA SOSIAL
SEBAGAI ARENA
WACANA



KRITIK, SATIRE,
DAN SUARA
KEWARGAAN



PARTISIPASI NYATA
UNTUK PERUBAHAN
INDONESIA

Oleh:

Rudy C Tarumingkeng

MEMBACA ZAMAN. MEMAHAMI SUARA. MERAWAT DEMOKRASI.

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Anggota MPR-RI, 1982-1987

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Chairman, Board of Professors, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Chairman, Academic Senate, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyc75@gmail.com

6 April 2026

ANAK MUDA, MEME POLITIK, DAN BAHASA BARU DEMOKRASI INDONESIA

Abstrak

Makalah ini membahas bagaimana anak muda Indonesia menggunakan meme politik sebagai salah satu bahasa baru demokrasi dalam era digital. Argumen utamanya adalah bahwa meme politik tidak lagi dapat dipandang sekadar sebagai lelucon internet, melainkan sebagai bentuk komunikasi politik yang memadatkan kritik, satire, identitas kolektif, dan sikap kewargaan ke dalam format yang cepat, visual, dan mudah dibagikan. Dalam konteks Indonesia, perubahan ini sangat penting karena pemilih muda—khususnya generasi Z dan milenial—menjadi mayoritas dalam pemilu, sementara internet dan platform sosial telah menjadi infrastruktur utama komunikasi publik. Makalah ini menunjukkan bahwa meme politik bekerja pada dua arah sekaligus. Di satu sisi, ia memperluas partisipasi informal, memudahkan anak muda mengekspresikan kemarahan, sinisme, harapan, dan solidaritas; di sisi lain, ia juga dapat dipakai sebagai instrumen simplifikasi berlebihan, manipulasi narasi, polarisasi, bahkan astroturfing oleh elite. Dengan menelaah data kepemudaan, penetrasi internet, pemilu 2024, riset akademik tentang meme dan aktivisme digital, serta contoh-contoh mutakhir seperti politik “gemoy”, simbol “Peringatan Darurat”, dan resonansi “Indonesia Gelap”, makalah ini menegaskan bahwa demokrasi Indonesia sedang mengalami pergeseran bahasa: dari pidato panjang dan jargon institusional menuju komunikasi politik yang lebih visual, ringkas, emosional, dan memetik. Tantangan ke depan bukanlah

menolak bahasa baru ini, melainkan memastikan bahwa budaya meme memperkaya deliberasi demokratis, bukan menggantikannya dengan kebisingan sesaat. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Kata kunci: anak muda, meme politik, demokrasi digital, generasi Z, partisipasi politik, satire politik, Indonesia

Anak Muda, Meme Politik, dan Bahasa Baru Demokrasi Indonesia

Pendahuluan

Dalam percakapan publik Indonesia, anak muda sering ditempatkan dalam posisi ambigu. Mereka dipuji sebagai masa depan demokrasi, tetapi pada saat yang sama dicurigai apatis, terlalu cair, terlalu sinis, dan lebih akrab dengan ironi internet daripada dengan diskursus politik formal. Gambaran semacam ini kini semakin sulit dipertahankan. Secara demografis, BPS mencatat bahwa pada 2024 jumlah pemuda Indonesia mencapai 64,22 juta jiwa atau sekitar seperlima penduduk nasional, dan lebih dari 60 persen di antaranya tinggal di wilayah perkotaan. Secara elektoral, KPU mencatat bahwa pemilih milenial dan generasi Z dalam Pemilu 2024 mencapai 58,38 persen dari seluruh pemilih. Artinya, anak muda bukan kelompok pinggiran dalam politik Indonesia, melainkan pusat gravitasi baru yang sangat menentukan arah kompetisi, gaya kampanye, dan bahasa politik nasional. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Pada saat yang sama, infrastruktur komunikasi anak muda juga telah berubah secara drastis. APJII melaporkan bahwa jumlah pengguna internet Indonesia pada 2024 mencapai 221.563.479 orang dengan tingkat penetrasi 79,5 persen. Di dalam komposisi itu, Gen Z merupakan kelompok terbesar, disusul milenial. Dengan kata lain, sebagian besar generasi yang sedang membentuk arah politik Indonesia juga merupakan generasi yang

hidup di dalam ruang digital nyaris setiap hari. Dalam ruang seperti inilah meme politik memperoleh habitat sosialnya: ia lahir dari ekonomi perhatian, budaya visual, dan kecepatan sirkulasi yang tidak dimiliki medium politik lama. ([APJII](#))

Karena itu, jika demokrasi biasanya dibayangkan bekerja melalui pidato, debat, manifesto, dan berita, maka demokrasi Indonesia hari ini juga semakin sering berbicara melalui template gambar, potongan video, caption satiris, tangkapan layar, dan simbol visual yang direplikasi berjuta kali. Sandy Allifiansyah sejak 2017 sudah menunjukkan bahwa di Indonesia meme digunakan bukan hanya sebagai ekspresi humor, tetapi juga sebagai refleksi kaum muda atas isu-isu demokrasi, sosial, dan politik, serta memperluas spektrum demokrasi itu sendiri. Temuan ini kini terasa makin relevan, karena budaya memetik telah berkembang dari ruang pinggiran internet menjadi salah satu kosakata utama politik publik. ([Open Journal Systems](#))

Makalah ini berangkat dari tesis bahwa meme politik telah menjadi “bahasa baru” demokrasi Indonesia, terutama bagi anak muda. Istilah “bahasa baru” di sini tidak berarti bahasa lama hilang, melainkan bahwa cara menyatakan kritik, afeksi politik, identitas, dan oposisi sedang bergeser. Anak muda tetap bisa memilih dalam pemilu, turun ke jalan, menulis opini, atau berorganisasi di kampus. Tetapi mereka juga semakin sering membentuk pendapat, membangun solidaritas, dan menandai posisi politik melalui meme. Oleh sebab itu, memahami demokrasi Indonesia kontemporer menuntut kita memahami bukan hanya lembaga, tetapi juga format ekspresinya.

Kerangka Konseptual: Meme sebagai Bahasa Politik

Secara sederhana, meme dapat dipahami sebagai unit budaya digital yang disalin, dimodifikasi, dan diedarkan secara berulang oleh banyak pengguna. Namun dalam politik, meme bekerja lebih dari sekadar salinan lucu. Ia memadatkan makna yang kompleks ke dalam format yang ringan, cepat dikenali, dan mudah dipakai kembali oleh banyak orang. Allifiansyah

menunjukkan bahwa internet meme di Indonesia telah menjadi medium baru bagi kaum muda untuk membentuk wacana dan mengartikulasikannya secara unik. Dalam konteks tersebut, meme bukan hanya hasil budaya internet, tetapi juga mekanisme artikulasi politik dari bawah. ([Open Journal Systems](#))

Dari sudut ilmu komunikasi politik, kekuatan meme terletak pada tiga hal. Pertama, ia menyederhanakan. Isu yang rumit—korupsi, dinasti politik, revisi undang-undang, ketimpangan, bahkan ancaman terhadap demokrasi—dapat dipadatkan menjadi simbol yang langsung dipahami. Kedua, ia mengundang partisipasi. Orang tidak harus menulis esai atau bergabung dengan organisasi untuk ikut menyatakan sikap; cukup *repost*, memodifikasi, atau menambahkan caption. Ketiga, ia membangun komunitas afektif. Meme memungkinkan orang merasa “kita paham lelucon yang sama”, dan perasaan bersama itu sangat penting bagi lahirnya solidaritas politik. Temuan riset internasional juga menunjukkan bahwa paparan meme politik dapat menjembatani sinisme politik menuju partisipasi daring, khususnya pada pengguna yang sebelumnya cenderung sinis terhadap politik. ([Sage Journals](#))

Dalam konteks Indonesia, fungsi itu diperluas oleh budaya humor dan satire. Artikel Astuti dan Wulandari pada 2025 menegaskan bahwa satire politik di media sosial tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana edukasi politik informal, serta dapat berperan strategis dalam membentuk opini politik generasi muda. Dengan kata lain, humor di internet bukan sekadar pelepas ketegangan; ia dapat menjadi cara untuk mengajarkan siapa yang dianggap problematis, kebijakan mana yang dianggap tidak adil, dan simbol mana yang patut dicurigai. Inilah yang membuat meme politik layak dibaca sebagai bahasa demokrasi, bukan sekadar hiburan politik. ([eJournal of Sunan Gunung Djati](#))

Akan tetapi, bahasa meme berbeda dari bahasa debat formal. Ia cenderung fragmentaris, intertekstual, dan sangat bergantung pada kedekatan budaya digital. Ia tidak selalu menjelaskan, tetapi sering menandai. Ia tidak selalu

menyusun argumen, tetapi sering menciptakan rasa. Di sinilah letak kekuatan sekaligus bahayanya. Sebagai bahasa baru demokrasi, meme dapat memperluas akses karena siapa pun bisa ikut serta. Tetapi karena ia bekerja lewat singkatan visual dan afek, ia juga dapat membuat percakapan politik bergerak terlalu cepat dari penilaian menuju penghakiman. ([Open Journal Systems](#))

Anak Muda Indonesia sebagai Subjek Politik Digital

Agar peran meme politik dapat dipahami secara tepat, kita perlu melihat posisi anak muda Indonesia hari ini. Undang-Undang Kepemudaan masih mendefinisikan pemuda sebagai warga negara berusia 16 sampai 30 tahun, dan Mahkamah Konstitusi pada Januari 2026 menegaskan bahwa definisi ini tetap berlaku. Secara statistik, BPS menunjukkan bahwa generasi muda Indonesia bukan hanya besar jumlahnya, tetapi juga memiliki karakter sosial yang khas: lebih urban, lebih terkoneksi, dan menghadapi transisi pendidikan-ke-kerja yang semakin rumit. Karena itu, generasi muda Indonesia tumbuh dalam ruang yang menuntut mereka peka pada masalah biaya hidup, pekerjaan, pendidikan, dan representasi politik.

([Peraturan.go.id](#))

CSIS memberi gambaran yang lebih tajam tentang bagaimana anak muda memandang politik. Dalam laporan "Pemilih Muda dalam Pemilihan Umum 2024", CSIS memperkirakan jumlah pemilih muda mendekati 60 persen dari total pemilih, atau mendekati 114 juta orang. Laporan yang sama menemukan bahwa pemilih muda bersifat dinamis, adaptif, dan responsif, serta bahwa penetrasi internet dan meningkatnya penggunaan media sosial diperkirakan mengubah arah dan preferensi politik mereka. CSIS juga mencatat adanya pergeseran preferensi kepemimpinan di kalangan pemilih muda: dari figur yang sekadar "merakyat dan sederhana" menuju figur yang "jujur dan anti-korupsi". Pergeseran ini penting karena menunjukkan bahwa anak muda tidak berhenti memikirkan politik; mereka justru menuntut politik yang berbeda.

Temuan lain dari CSIS juga menunjukkan sumber kegelisahan itu. Lembaga seperti DPR termasuk yang kepercayaannya berada di bawah rata-rata di mata pemilih muda, dan laporan tersebut secara eksplisit mengaitkan penurunan dukungan pada demokrasi dengan rendahnya kepercayaan pada lembaga politik serta memburuknya persepsi akibat korupsi politik. Dalam situasi seperti ini, anak muda tidak selalu menolak demokrasi; yang sering mereka tolak adalah institusi yang dianggap tidak lagi mewakili isi demokrasi. Di sinilah meme menjadi penting: ia memberi kanal ekspresi yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih sesuai dengan pengalaman generasi yang curiga pada formalitas politik.

KPU memperlihatkan sisi lain dari cerita ini. Meski sinisme terhadap institusi ada, tingkat partisipasi pemilu presiden 2024 tetap mencapai 81,48 persen, di atas target partisipasi nasional 79,5 persen, dan pemilih muda tetap mendominasi struktur DPT. Ini berarti generasi muda Indonesia tidak dapat dicap semata-mata apatis. Mereka tetap masuk ke arena elektoral, tetapi cara mereka memproses politik semakin dipengaruhi oleh budaya digital, simbol visual, dan percakapan yang bergerak cepat di platform sosial. Dengan demikian, budaya meme bukan tanda hilangnya politik, melainkan tanda berubahnya cara berpolitik.

Dari Apatisme ke Ekspresi Memetik

Salah satu kesalahan paling umum dalam membaca generasi muda ialah menyamakan sinisme dengan ketidakpedulian. Padahal, dalam politik digital, sinisme sering justru menjadi energi partisipasi. Meme bekerja sangat baik di wilayah ini karena ia mampu mengubah kejengkelan terhadap politik formal menjadi bentuk ekspresi yang dapat dibagikan bersama. Bila pidato resmi terdengar jauh dan jargon partai terasa hambar, maka meme menawarkan bahasa yang lebih dekat dengan ritme keseharian anak muda: cepat, ironis, langsung, dan bercampur dengan budaya populer. ([Open Journal Systems](#))

Di titik ini, meme politik berfungsi sebagai jembatan. Ia menghubungkan orang yang malas membaca dokumen panjang dengan isu yang

sebenarnya sangat serius. Ia menghubungkan orang yang tidak percaya partai dengan perasaan bahwa mereka masih bisa menyatakan posisi politik. Penelitian Ahmed dan Masood memperlihatkan bahwa paparan meme politik dapat memobilisasi individu yang memiliki tingkat sinisme politik tinggi menuju partisipasi daring yang lebih aktif. Meskipun studi itu berbasis konteks Singapura, implikasinya relevan bagi Indonesia: budaya meme dapat mengubah “politik itu kotor” dari alasan untuk menjauh menjadi alasan untuk mengkritik. ([Sage Journals](#))

Karena itu, pergeseran dari apatisme ke aktivisme memetik tidak berarti anak muda tiba-tiba menjadi ideologis. Yang lebih tepat, mereka menemukan medium yang sesuai dengan pengalaman mereka. Politik kini hadir di antara kelas kuliah, notifikasi aplikasi, *timeline* yang bercampur antara berita dan hiburan, serta ruang digital yang memungkinkan ekspresi simultan antara humor dan kemarahan. Dalam lingkungan seperti itu, meme menjadi bentuk politik yang rendah hambatan masuknya, tetapi tinggi daya sirkulasinya. Inilah salah satu alasan mengapa meme politik makin sentral dalam demokrasi Indonesia kontemporer. ([APJII](#))

Meme Politik dalam Pemilu 2024: Personalisasi, Citra, dan Rebranding

Pemilu 2024 memberi ilustrasi paling jelas tentang bagaimana meme dan budaya visual digital telah masuk ke jantung politik nasional. Reuters melaporkan bahwa seluruh kandidat presiden aktif bertarung di TikTok untuk merebut pemilih muda. Di ruang ini, kampanye tidak bergerak terutama melalui gagasan yang rumit, melainkan lewat tarian, demonstrasi memasak, video singkat, dan citra yang dirancang untuk terasa akrab. Dalam artikel lain, Reuters menyoroti bagaimana avatar AI “gemoy” Prabowo menjadi salah satu simbol paling menonjol dalam kampanye 2024. Figur yang sebelumnya dikenal keras direkonstruksi menjadi sosok “cuddly”, lucu, dan dekat dengan Gen Z; Reuters menulis bahwa tagar terkait Prabowo di TikTok telah mengumpulkan sekitar 19 miliar tayangan. ([Reuters](#))

Kasus “gemoy” penting karena menunjukkan bahwa meme politik tidak selalu lahir dari bawah sebagai kritik rakyat. Ia juga dapat direkayasa dari atas sebagai strategi rebranding elite. Di sinilah riset Ubaidillah dan kolega menjadi sangat relevan. Dalam studi mereka tentang Pemilu 2024, mereka menyimpulkan bahwa meme memainkan peran signifikan dalam pemilu presiden, khususnya dalam membentuk wacana yang bercorak illiberal dan elite. Kajian itu juga menunjukkan bahwa meme telah berkembang melampaui alat kampanye digital biasa dan dapat dipakai untuk melegitimasi elite dalam konteks politik yang tidak sepenuhnya liberal. Dengan kata lain, meme politik di Indonesia bukan hanya bahasa warga; ia juga bahasa kekuasaan. ([Advances in Southeast Asian Studies](#))

Temuan ini diperkuat oleh Baulch, Matamoros-Fernández, dan Suwana dalam studi tentang Pemilu 2019. Mereka menunjukkan bahwa elite politik dapat membangun “meme factories” dan memanfaatkan asosiasi budaya meme dengan suara populer untuk meng-*astroturf* diskursus publik, khususnya melalui infrastruktur WhatsApp. Temuan itu penting untuk dibawa ke pembacaan 2024–2026, karena ia mengingatkan bahwa budaya meme tidak otomatis demokratis. Ia bisa menjadi ruang partisipasi, tetapi bisa juga menjadi ruang simulasi partisipasi. Bahasa baru demokrasi dapat dibajak menjadi bahasa baru propaganda. ([Sage Journals](#))

Dengan demikian, pemilu 2024 menunjukkan wajah ganda meme politik. Di satu sisi, ia mendekatkan politik kepada pemilih muda dengan format yang terasa akrab. Di sisi lain, ia membuka peluang besar bagi personalisasi berlebihan, simplifikasi agenda, dan pemasaran emosi yang menutupi perdebatan substantif. Bahasa meme membuat politik lebih menarik, tetapi tidak otomatis membuatnya lebih deliberatif. Ini adalah salah satu paradoks utama demokrasi digital Indonesia. ([Reuters](#))

Meme sebagai Kritik: dari “Peringatan Darurat” sampai “Indonesia Gelap”

Jika “gemoy” memperlihatkan meme sebagai instrumen rebranding dari atas, maka gelombang protes 2024–2025 memperlihatkan sisi sebaliknya:

meme sebagai simbol kritik kolektif dari bawah. Pada Agustus 2024, protes terhadap manuver perubahan aturan pilkada meluas di berbagai kota. Reuters melaporkan bahwa ribuan orang turun ke jalan dan akhirnya menekan badan legislasi serta penyelenggara pemilu untuk bergerak sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. Yang menarik, peristiwa ini juga diiringi oleh ledakan simbol visual “Peringatan Darurat” yang menyebar luas di media sosial. Simbol itu bekerja sebagai meme politik dalam arti yang sangat kuat: ia sederhana, langsung, mudah direplikasi, dan mampu mengubah kegelisahan konstitusional menjadi bahasa publik yang instan. ([Reuters](#))

Dalam bentuk seperti ini, meme menjalankan fungsi “alarm demokrasi”. Ia memadatkan persoalan hukum dan prosedur ke dalam tanda yang bisa dipahami jutaan orang tanpa harus membaca putusan atau draf undang-undang. Fungsinya bukan menggantikan argumen hukum, tetapi mempercepat distribusi rasa genting. Di sinilah bahasa meme memperlihatkan peran politiknya yang khas: ia mengubah abstraksi menjadi afek, lalu afek itu dapat bermigrasi menjadi mobilisasi. Temuan Nugroho tentang aktivisme digital di Indonesia menunjukkan bahwa gerakan-gerakan anak muda modern sangat bergantung pada sinergi daring-luring; tagar dan konten viral dapat mendorong demonstrasi offline, memperluas liputan media, dan menekan pembuat kebijakan.

Pola serupa tampak pada “Indonesia Gelap” pada Februari 2025. Reuters melaporkan bahwa ribuan mahasiswa turun di berbagai kota menentang pemotongan anggaran dan kebijakan-kebijakan yang mereka anggap mengancam masa depan sosial mereka. Dalam laporan itu, Reuters juga menulis bahwa “Dark Indonesia” telah mendapatkan resonansi kuat di media sosial, dan tren lain seperti “Just Escape First” ikut beredar sebagai ekspresi keputusasaan anak muda. Di sini kita melihat meme dan tagar bukan hanya alat penyebaran, tetapi juga cara menamai suasana zaman. Anak muda tidak sekadar menolak satu kebijakan; mereka memberi nama gelap bagi pengalaman politik yang mereka rasakan. ([Reuters](#))

Meme politik, karena itu, sering bekerja sebagai bentuk “terjemahan afektif” atas pengalaman demokrasi. Ketika lembaga terasa jauh, hukum terasa teknis, dan penjelasan pemerintah terdengar datar, meme memberi bentuk yang lebih tajam pada emosi publik. Bahasa baru demokrasi bukan sekadar bahasa yang lebih ringkas, tetapi bahasa yang mampu menyatukan emosi, simbol, dan tindakan. Dalam konteks Indonesia, ini membuat meme bukan lawan dari politik jalanan, melainkan salah satu bahan bakarnya.

Mengapa Meme Efektif bagi Anak Muda?

Efektivitas meme bagi anak muda Indonesia lahir dari pertemuan tiga faktor. Pertama, kecocokan format. Platform yang dominan di kalangan anak muda—TikTok, Instagram, X, YouTube, WhatsApp—mendorong konten yang pendek, visual, mudah di-*screen capture*, dan mudah diubah. APJII menunjukkan dominasi Gen Z dan milenial dalam komposisi pengguna internet. Dalam ekosistem seperti ini, meme bukan bentuk tambahan; ia salah satu format alamiahnya. ([APJII](#))

Kedua, kecocokan psikologis dan kultural. Generasi muda hidup dalam lingkungan informasi yang melimpah, tetapi perhatian yang terbatas. Mereka terbiasa menilai politik bukan hanya dari isi, tetapi dari gaya, simbol, dan autentisitas performatif. Meme menyediakan cara untuk merespons politik tanpa harus masuk terlebih dahulu ke struktur organisasi formal. Ia cocok bagi generasi yang kritis, tetapi juga sibuk; sinis, tetapi tetap ingin menandai posisi; jauh dari partai, tetapi dekat dengan isu. Riset Astuti dan Wulandari memperlihatkan bahwa satire politik dapat berperan sebagai edukasi politik informal bagi generasi Z. Itu menjelaskan mengapa meme bukan sekadar “pengalih perhatian” dari politik, melainkan salah satu pintu masuk ke politik. ([eJournal of Sunan Gunung Djati](#))

Ketiga, kecocokan dengan logika partisipasi jaringan. Nugroho menunjukkan bahwa aktivisme digital anak muda Indonesia bekerja melalui kampanye multi-platform, *live-streaming*, “tweet storm”, dan koordinasi yang berjalan paralel dengan aksi jalanan. Dalam lingkungan ini, meme

berguna karena ia mudah dipakai ulang oleh jaringan yang longgar. Orang yang tidak saling kenal secara organisasi dapat tetap merasa berada dalam kubu yang sama karena membagikan simbol, lelucon, dan kritik yang serupa. Meme, dengan demikian, membantu membangun identitas kolektif yang cepat.

Batas dan Bahaya Bahasa Meme

Namun, mengakui pentingnya meme politik tidak berarti meromantisasinya. Bahaya pertama adalah simplifikasi. Isu yang rumit bisa direduksi menjadi tokoh jahat versus tokoh lucu, atau kebijakan kompleks dipadatkan menjadi satu frasa yang memang mudah viral tetapi miskin nuansa. Dalam pemilu, hal ini dapat menggeser evaluasi rasional menjadi konsumsi citra. Politik “gemoy” memperlihatkan dengan sangat gamblang bagaimana citra visual dan afek digital dapat menutupi memori politik yang lebih sulit. ([Reuters](#))

Bahaya kedua adalah manipulasi terorganisasi. Studi Baulch dan kolega menunjukkan bahwa elite dapat memanfaatkan “meme factories” dan infrastruktur WhatsApp untuk mendorong *astroturfing*—yakni membuat diskursus buatan seolah-olah muncul secara organik dari publik. Jika demikian, maka tidak semua meme politik adalah ekspresi rakyat; sebagian adalah simulasi kerakyatan. Dalam sistem media yang sangat platformized, batas antara partisipasi spontan dan orkestrasi buzzer makin kabur. ([Sage Journals](#))

Bahaya ketiga adalah misinformasi, pelecehan digital, dan ketergantungan pada viralisme. Nugroho menekankan bahwa aktivis muda harus menghadapi hoaks, serangan daring, dan kontra-mobilisasi *cyber troops*. Studi tersebut juga menekankan bahwa ketergantungan pada viralisme membuat gerakan mudah kehilangan energi setelah momen puncak berlalu, kecuali jika identitas kolektif yang lahir secara daring dilembagakan lebih lanjut melalui tindak lanjut, mentoring, atau kegiatan komunitas. Dengan kata lain, meme dapat memantik perhatian, tetapi perhatian belum tentu berubah menjadi daya ubah.

Bahaya keempat adalah pembatasan ruang digital oleh negara dan platform. Freedom House menilai Indonesia tetap berada pada kategori “Partly Free” baik dalam kebebasan umum maupun kebebasan internet. Laporan *Freedom on the Net 2025* menyoroti bahwa para pengkritik pemerintah, jurnalis, dan pengguna internet masih menghadapi penuntutan pidana, serangan, dan pelecehan akibat aktivitas daring mereka. Sementara itu, pada Maret 2026 pemerintah Indonesia mulai menerapkan pembatasan akun media sosial berisiko tinggi bagi anak di bawah 16 tahun, dan Reuters melaporkan bahwa aturan tersebut mulai diberlakukan pada 28 Maret 2026. Terlepas dari tujuan perlindungan anak, perkembangan ini menunjukkan bahwa ruang digital tempat bahasa meme tumbuh juga semakin menjadi ruang regulasi dan pengawasan. ([Reuters](#))

Bahasa Baru Demokrasi: Apa yang Sebenarnya Berubah?

Jika demikian, apa yang benar-benar baru dari demokrasi Indonesia hari ini? Yang baru bukan semata keberadaan humor politik—humor sudah lama ada. Yang baru adalah skala, kecepatan, dan kedudukannya. Dulu bahasa politik utama datang dari partai, media arus utama, tokoh formal, dan institusi negara. Kini, bahasa politik bisa lahir dari akun anonim, komunitas kampus, kreator konten, potongan video, atau satu gambar yang direplikasi tanpa pusat komando jelas. Anak muda bukan hanya audiens pesan politik; mereka ikut memproduksi, mengedit, menertawakan, dan mendistribusikannya. ([Reuters](#))

Perubahan kedua adalah bergesernya medan legitimasi. Dalam politik lama, siapa yang paling berwenang bicara ditentukan oleh jabatan, senioritas, atau kedekatan dengan institusi. Dalam politik memetik, legitimasi sering datang dari resonansi: siapa yang paling mampu menangkap rasa publik dalam simbol yang tepat. Karena itu, satu meme yang efektif dapat lebih memengaruhi imajinasi politik daripada banyak konferensi pers. Inilah yang membuat demokrasi Indonesia tampak makin visual, makin terpotong-potong, dan sekaligus makin terbuka terhadap intervensi dari aktor-aktor nonformal. ([Open Journal Systems](#))

Perubahan ketiga adalah lahirnya publik yang lebih performatif. Politik tidak lagi cukup “benar” secara isi; ia juga harus bisa tampil, dikutip, diparodikan, dan diubah menjadi konten. Ini memiliki dua sisi. Dari sisi positif, politik menjadi lebih mudah diakses dan anak muda lebih mudah masuk. Dari sisi negatif, politik berisiko dipaksa selalu mengikuti logika pertunjukan. Demokrasi yang sehat memerlukan keduanya: bahasa yang populer dan kapasitas untuk berpikir melampaui popularitas. Tantangannya ialah menjaga agar bahasa baru tidak menghancurkan kedalaman diskusi yang dibutuhkan demokrasi. ([Reuters](#))

Implikasi bagi Demokrasi Indonesia

Ada setidaknya empat implikasi penting. Pertama, pendidikan kewargaan dan pendidikan politik di Indonesia harus memperhitungkan budaya meme sebagai kenyataan, bukan sekadar gangguan. Jika meme sudah menjadi medium utama ekspresi politik anak muda, maka literasi demokrasi harus mengajarkan cara membaca satire, membedakan kritik dari manipulasi, serta memeriksa konteks di balik simbol yang viral. Mengabaikan budaya meme hanya akan membuat pendidikan politik tertinggal dari kenyataan sosial anak muda. ([eJournal of Sunan Gunung Djati](#))

Kedua, partai politik dan institusi negara perlu memahami bahwa komunikasi politik yang efektif kepada generasi muda bukan hanya soal meramaikan platform, tetapi juga soal kejujuran simbolik. Pemilih muda, menurut CSIS, makin menghargai karakter pemimpin yang jujur dan anti-korupsi. Itu berarti bahasa visual semata tidak cukup bila tidak disertai kredibilitas substantif. Meme bisa membantu memperluas jangkauan, tetapi tidak dapat terus-menerus menutup defisit kepercayaan jika institusi tetap dinilai koruptif atau elitis.

Ketiga, masyarakat sipil dan kampus perlu mengembangkan strategi yang tidak hanya viral, tetapi juga berkelanjutan. Nugroho menegaskan pentingnya menginstitusikan identitas kolektif yang lahir di dunia maya agar tidak menguap setelah gelombang viralisme turun. Ini berarti bahasa meme harus bisa dihubungkan dengan riset, advokasi, aksi lapangan,

pengawasan kebijakan, dan kanal hukum. Meme efektif sebagai alarm, tetapi demokrasi tetap memerlukan organisasi yang sanggup bekerja setelah alarm berbunyi.

Keempat, negara harus berhati-hati agar tidak menjawab bahasa baru demokrasi dengan pembatasan yang mematikan kreativitas sipil.

Perlindungan anak, penanggulangan hoaks, dan keamanan digital memang penting. Namun jika regulasi digital bergerak terlalu jauh ke arah kontrol yang kaku, ruang tempat anak muda belajar menjadi warga digital bisa ikut menyempit. Masa depan demokrasi Indonesia bukan hanya soal bagaimana anak muda menggunakan meme, tetapi juga soal apakah negara memberi ruang yang cukup bagi eksperimen bahasa politik generasi tersebut. ([Reuters](#))

Penutup

Makalah ini menunjukkan bahwa anak muda, meme politik, dan demokrasi Indonesia tidak dapat lagi dipahami dalam kerangka lama yang memisahkan humor dari politik, atau internet dari kewargaan. Dalam Indonesia kontemporer, meme telah menjadi salah satu bahasa utama melalui mana generasi muda mengolah kekecewaan, membangun solidaritas, menertawakan elite, mengkritik institusi, dan kadang-kadang juga merayakan figur politik tertentu. Sejak studi awal Allifiansyah hingga kajian-kajian terbaru tentang satire, kampanye digital, dan aktivisme hibrida, terlihat bahwa meme telah bergerak dari pinggiran budaya digital ke pusat komunikasi politik. ([Open Journal Systems](#))

Tetapi bahasa baru ini bersifat ambivalen. Ia dapat memperluas demokrasi dengan membuat politik terasa dekat, lucu, dan dapat diakses. Ia juga dapat menyempitkan demokrasi ketika dipakai untuk propaganda emosional, disinformasi, atau manipulasi elite. Ia dapat menyalakan perlawanan dari bawah, seperti dalam gelombang simbol "Peringatan Darurat" atau resonansi "Indonesia Gelap". Namun ia juga dapat dipakai untuk meremajakan citra elite secara efektif, seperti terlihat dalam politik "gemoy". Karena itu, pertanyaan utamanya bukan apakah meme baik atau

buruk bagi demokrasi, melainkan di bawah kondisi apa ia memperkaya demokrasi, dan di bawah kondisi apa ia menyesatkannya. ([Reuters](#))

Pada akhirnya, demokrasi Indonesia sedang belajar berbicara dengan logat baru: lebih visual, lebih singkat, lebih ironis, lebih emosional, dan lebih cepat beredar. Anak muda berada di pusat perubahan ini karena merekalah mayoritas pemilih, mayoritas pengguna platform, dan sering kali mayoritas produsen simbol digital. Tantangan bagi Indonesia bukan mengembalikan politik ke bahasa lama, melainkan memastikan bahwa bahasa baru ini tetap dapat dihubungkan dengan nalar publik, tanggung jawab politik, dan kerja demokrasi yang lebih mendalam. Jika itu berhasil, meme politik tidak akan menjadi tanda kemunduran politik, melainkan salah satu bentuk baru dari kewargaan demokratis Indonesia.

Glosarium

Anak muda / pemuda: dalam kerangka hukum Indonesia, warga negara berusia 16–30 tahun menurut UU No. 40 Tahun 2009, dan definisi itu ditegaskan kembali oleh Mahkamah Konstitusi pada Januari 2026. ([Peraturan.go.id](#))

Meme politik: unit budaya digital yang direplikasi, dimodifikasi, dan diedarkan untuk mengekspresikan kritik, dukungan, satire, atau identitas politik. ([Open Journal Systems](#))

Bahasa baru demokrasi: cara baru mengekspresikan sikap dan konflik politik melalui format visual, singkat, satiris, dan mudah dibagikan di ruang digital. ([Open Journal Systems](#))

Aktivisme hibrida: pola partisipasi yang menggabungkan mobilisasi daring dan luring, misalnya tagar dan meme yang berujung pada protes jalanan atau advokasi kebijakan.

Astroturfing: penciptaan kesan seolah-olah dukungan publik muncul secara organik, padahal direayasa secara terorganisasi oleh elite atau tim kampanye. ([Sage Journals](#))

Satire politik: bentuk humor yang digunakan untuk mengkritik kekuasaan, kebijakan, atau perilaku elite, dan dalam konteks media sosial dapat berfungsi sebagai edukasi politik informal. ([eJournal of Sunan Gunung Djati](#))

Viralisme: penyebaran sangat cepat suatu konten di platform digital; dapat membantu mobilisasi, tetapi juga membuat gerakan bergantung pada momentum sesaat.

Cyber troops: aktor yang secara terorganisasi menggunakan platform digital untuk memengaruhi narasi, menyerang lawan, atau melemahkan gerakan sipil.

Referensi (APA 7)

Ahmed, S., & Masood, M. (2024). Breaking barriers with memes: How memes bridge political cynicism to online political participation. *Social Media + Society*, 10(2). <https://doi.org/10.1177/20563051241261277>

Allifiansyah, S. (2017). Kaum muda, meme, dan demokrasi digital di Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 13(2), 151–164. <https://doi.org/10.24002/jik.v13i2.676>

APJII. (2024, February 7). *Jumlah pengguna internet Indonesia tembus 221 juta orang*. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.

Astuti, D. P., & Wulandari, L. (2025). Satire media sosial: Medium baru pembentukan persepsi politik generasi Z. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 15(1), 1–30. <https://doi.org/10.15575/jispo.v15i1.43980>

Baulch, E., Matamoros-Fernández, A., & Suwana, F. (2024). Memetic persuasion and WhatsAppification in Indonesia's 2019 presidential election. *New Media & Society*, 26(5), 2473–2491.

<https://doi.org/10.1177/14614448221088274>

Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Pemuda Indonesia 2024*. BPS.

Centre for Strategic and International Studies. (2023). *Pemilih muda dalam pemilihan umum 2024: Dinamis, adaptif dan responsif*. CSIS Indonesia.

Freedom House. (2025). *Freedom in the World 2025: Indonesia*. Freedom House.

Freedom House. (2025). *Freedom on the Net 2025: Indonesia*. Freedom House.

International IDEA. (2026). *Indonesia: The Global State of Democracy country profile*. International IDEA.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2025). *Lembar fakta KPU edisi 1: Daftar pemilih tetap dan hasil Pemilu 2024*. KPU RI.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026, January 19). *Uji UU Kepemudaan ditolak, definisi pemuda tetap berusia 16–30 tahun*. MKRI.

Nugroho, B. H. (2025). Digital activism and youth participation in Indonesia: A qualitative study of social media's role in contemporary social movements. *Privet Social Sciences Journal*, 5(10), 91–105.

<https://doi.org/10.55942/pssj.v5i10.603>

Reuters. (2024, February 8). *Generative AI may change elections this year. Indonesia shows how*. Reuters.

Reuters. (2024, February 12). *Dance moves and deepfakes: Indonesia presidential candidates duke it out on TikTok*. Reuters.

Reuters. (2024, August 23). *Protesters rally again in Indonesia as tempers flare over political manoeuvres*. Reuters.

Reuters. (2025, February 20). *Students lead 'Dark Indonesia' protests against budget cuts*. Reuters.

Reuters. (2026, March 6). *Indonesia to restrict social media access for children under 16, minister says*. Reuters.

Reuters. (2026, March 27). *Indonesia's social media curbs for under-16s set to start, few know how they work*. Reuters.

Reuters. (2026, March 31). *Indonesia summons Meta and Google over non-compliance with child social media curbs, minister says*. Reuters.

Ubaidillah, U., Santoso, W. M., Widyawati, N., Purwadi, P., & Windarsih, A. (2025). Memes and the Indonesian 2024 presidential elections: Performative politics in an illiberal setting. *Advances in Southeast Asian Studies*, 18(1). <https://doi.org/10.14764/10.ASEAS-0124>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. (2009). Republik Indonesia.

Copilot for this article: ChatGPT 5.4. Thinking (2026). Access date: 6 April 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69d37f65-3640-839d-822b-a5e109ffd3e1>